

Analisis Pengaruh Belanja Negara Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Slamet Widodo⁷ dan Dahiri⁸

Analysis Impact of State Expenditure Toward Inflation and Economy Growth

Abstract

State expenditure continue to increase every year. The increasing number is expected to boost the economic growth. However, it can not be ascertained whether it has a positive or negative influence to economic growth. They depends on government policy. The results of the analysis explained that state expenditure has one way effects to economic growth and inflation.

Keywords: *State Expenditure, Inflation, Economic Growth*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

APBN memuat rencana kerja tahunan pemerintah sebagaimana tercermin dalam prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan setiap tahunnya. Prioritas pembangunan ini tentunya menuntut adanya alokasi anggaran yang bersumber dari penerimaan maupun dari pembiayaan. Sumber penerimaan negara ditentukan dari besaran asumsi makro yang melandasi penyusunan postur APBN yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor yang menentukan kondisi APBN, antara lain estimasi atau prediksi besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang secara langsung maupun tidak langsung menentukan besaran berbagai komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, maupun pembiayaan anggaran yang akhirnya dapat berpengaruh pada postur APBN secara keseluruhan. Asumsi ekonomi makro terdiri dari beberapa indikator yaitu : pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar US, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ ICP*), lifting minyak, dan lifting gas. Asumsi ekonomi makro tersebut dibahas oleh Pemerintah bersama DPR RI dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian terkini.

⁷Lembaga : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI It.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

⁸Lembaga : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI It.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Dalam pelaksanaan APBN, seiring dengan perkembangan ekonomi di tingkat global dan regional, asumsi dasar ekonomi makro seringkali mengalami perubahan signifikan sehingga perlu dilakukan perubahan agar APBN bisa berjalan dengan sehat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan syarat perubahan APBN harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan asumsi ekonomi makro perlu mempertimbangkan banyak hal yaitu kondisi ekonomi global dan regional/domestik yang juga menentukan besaran pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan.

Kebutuhan pembiayaan atas program-program prioritas pembangunan, selanjutnya menentukan besaran belanja. Kekurangan atau kelebihan penerimaan dalam membiayai kebutuhan prioritas pembangunan akan tercermin dalam besaran pembiayaan APBN. Komponen-komponen dalam APBN inilah yang kemudian membentuk postur APBN yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya dan yang menentukan apakah APBN mengalami kondisi surplus, defisit, atau berimbang.

Jika besaran Pendapatan Negara dan Hibah lebih besar dari besaran belanja negara maka APBN dikatakan surplus, namun sebaliknya APBN dikatakan defisit. Indonesia menerapkan sistem anggaran defisit dalam APBN dengan kata lain, fokus pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menjadi salah satu tujuan pelaksanaan APBN dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, terutama pembiayaan dan utang.

Defisit anggaran bukanlah hal yang negatif dalam pengelolaan keuangan negara sepanjang batasannya dapat ditaati dan dikelola dengan penuh kehati-hatian. Tujuan defisit dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna membiayai prioritas pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian, agar secara bertahap tujuan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Salah satu indikator dalam APBN yang dapat menentukan seberapa besar likuiditas APBN dalam mengelola defisit anggaran adalah keseimbangan primer.

Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif, yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan negatif, yang berarti sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain, sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru (Kementerian Keuangan).

Kondisi defisit APBN ini menjadi salah satu problem utama penganggaran pembangunan nasional. Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun batasan defisit pembiayaan anggaran dan hutang telah ditetapkan, persoalannya bukan semata kuantitas besaran defisit namun bagaimana pemerintah dapat menjaga defisit anggaran dan hutang pada tingkat yang aman sehingga hal tersebut tidak membebani APBN setiap tahunnya. Dampak serius buruknya pengelolaan defisit adalah terjadinya akumulasi utang sebagai akibat pemerintah secara terus menerus menjual Surat Utang Negara, atau bahkan terganggunya kedaulatan Negara akibat ketergantungan yang tinggi atas sumber pembiayaan dari luar negeri.

Pengeluaran pemerintah/belanja negara menjadi salah satu komponen APBN yang menjadi roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai pos seperti belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, belanja subsidi dan bantuan sosial, serta belanja lain-lain. Pengeluaran pemerintah ini menjadi input bagi seluruh rumah tangga ekonomi yang terakumulasi dalam besaran pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa

$$Y = C + I + G + X - M.$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

C = Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Konsumen (RTK)

I = Pengeluaran Investasi Rumah Tangga Produsen (RTP)

G = Pengeluaran pemerintah dari Rumah Tangga Pemerintah (RTG)

X = Ekspor

M = Impor

Dalam konsep ini, konsumsi umumnya menjadi komponen terbesar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi (PDB) yaitu pengeluaran rumah tangga terhadap barang atau jasa. Sedangkan investasi merupakan pengeluaran investasi, seperti pembelian mesin dan perlengkapan pabrik. Pengeluaran pemerintah termasuk didalamnya belanja pemerintah terhadap barang atau jasa, belanja pegawai, dan pengeluaran investasi yang dilakukan oleh

pemerintah, tapi tidak termasuk pembayaran transfer seperti jaminan/tunjangan sosial. Ekspor menggambarkan ekspor bruto yang dihasilkan suatu negara, termasuk barang dan jasa bagi kepentingan konsumsi negara lain, sedangkan impor merupakan jumlah bruto atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri dari negara lain.

Mengingat peranan pengeluaran pemerintah sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tentunya ini juga membawa implikasi terhadap besaran inflasi yang terjadi dalam pelaksanaan tahun anggaran yang bersangkutan.

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari tingkat keparahannya inflasi terbagi menjadi empat, yaitu :

1) Inflasi ringan (*creeping inflation*)

Adalah inflasi yang lajunya kurang dari 10 persen setahun, sehingga inflasi ini tidak begitu dirasakan. Inflasi ini sering disebut juga inflasi yang merayap, dan tidak begitu mengganggu perekonomian secara nasional.

2) Inflasi sedang

Adalah inflasi yang lajunya antara 10 - 30 persen setahun. Pada tingkatan ini mulai dapat dirasakan naiknya harga-harga meski tidak begitu signifikan, dan jika tidak segera diatasi akan menjadi inflasi berat.

3) Inflasi berat

Inflasi yang lajunya berada pada batas antara 30 - 100 persen setahun. Pada tingkat ini harga-harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Indonesia pernah mengalami inflasi berat pada tahun 1998. Pada waktu itu inflasi per Desember mencapai 77,63 persen .

4) *Hiperinflasi*

Jenis inflasi ini sangat dirasakan karena dapat terjadi secara besar-besaran dan jika diukur berada di atas 100 persen setahun. Di Indonesia pada tahun 1966 pernah mengalami inflasi sebesar 600 persen, hal ini disebabkan pencetakan uang baru secara besar-besaran untuk menutup defisit anggaran pada waktu itu.

Untuk menghindari inflasi yang dapat mencederai pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mengelola pengeluarannya secara profesional dan penuh kehati-hatian tidak hanya dalam koridor menjaga besaran defisit keuangan negara namun juga implikasinya terhadap besaran inflasi yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah tersebut.

Oleh karena itu, optimalisasi belanja negara menjadi salah satu upaya bagi pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penetapan prioritas pengeluaran negara secara selektif pada pos-pos yang memang mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan tetap menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Belanja negara merupakan penjumlahan dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Secara ringkas, masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut :⁹

1. Belanja Pemerintah Pusat, yang terdiri dari:

- a) Belanja pegawai, yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi, dalam bentuk uang atau barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b) Belanja barang, adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
- c) Belanja modal, adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- d) Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik yang berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
- e) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat

⁹ Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia Edisi II, Kemenkeu RI

terjangkau oleh masyarakat (Undang-Undang tentang APBN). Pos subsidi ini terdiri dari:

- 1) Subsidi BBM
 - 2) Subsidi Listrik
 - 3) Subsidi Pangan
 - 4) Subsidi Pupuk
 - 5) Subsidi Benih
 - 6) Subsidi/Bantuan PSO
 - 7) Subsidi Bunga Kredit Program
 - 8) Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)
- f) Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah.
- g) Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga (Pemerintah) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya “risiko sosial”, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.
- h) Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat *ad hoc* (tidak terus menerus), kewajiban Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dan dana cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.

2. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
- a) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b) Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ruang Lingkup dana Otsus terdiri dari (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat .
 - c) Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. Ruang lingkungnya terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), Dana insentif daerah (DID), dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Mulai APBN tahun 2016 nomenklatur dana penyesuaian diubah menjadi DAK Non Fisik.

- d) Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan bagian dari asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBN, sehingga perlu kecermatan dalam menentukan besaran ekonomi makro tersebut. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh besaran belanja Negara setiap tahunnya. Dalam rumusan masalah akan dikaji mengenai pengaruh belanja negara terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

C. Tujuan Analisis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara garis besar analisis ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Menganalisis pengaruh belanja negara terhadap inflasi

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 1 ayat (7), APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrumen untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Dalam menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, yaitu terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam stabilitas perekonomian nasional.

APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan dan sebaliknya. Besaran postur APBN dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro, yang secara langsung maupun tidak langsung menentukan besaran berbagai komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, maupun pembiayaan anggaran yang akhirnya dapat berpengaruh pada postur APBN secara keseluruhan.
2. Kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai *baseline* penyusunan APBN berikutnya berdasarkan capaian kinerja pemerintah pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Parameter-parameter yang sifatnya spesifik seperti jumlah wajib pajak dan tarif pajak, besaran volume BBM bersubsidi, jumlah rumah tangga sasaran untuk perhitungan subsidi raskin.
4. Kebijakan Pemerintah yang sifatnya untuk menstimulus perekonomian atau karena adanya mandat UU, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, dan dana desa.

Keempat faktor tersebut secara umum akan menentukan kondisi postur APBN baik terhadap sisi komponen pendapatan maupun belanja negara. Selain itu, keempat faktor tersebut selanjutnya akan menentukan apakah postur APBN akan mengalami kondisi surplus, berimbang, atau defisit serta menentukan kebijakan dan besaran pada komponen pembiayaan anggaran.

Kebutuhan anggaran defisit menjadi tidak terelakan bila dilihat dari peran pemerintah dan fungsi APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN dari tahun 2000 sampai APBN tahun 2016 selalu mengalami defisit. Menurut Rahardja dan Manurung (2004) defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ($G > T$). Anggaran yang defisit ini ditempuh untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun dalam pelaksanaannya

berimplikasi pada besaran inflasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, dari target pertumbuhan ekonomi, perlu didukung oleh perkiraan besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam penyusunan postur APBN dan mempengaruhi besaran berbagai komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, maupun pembiayaan.

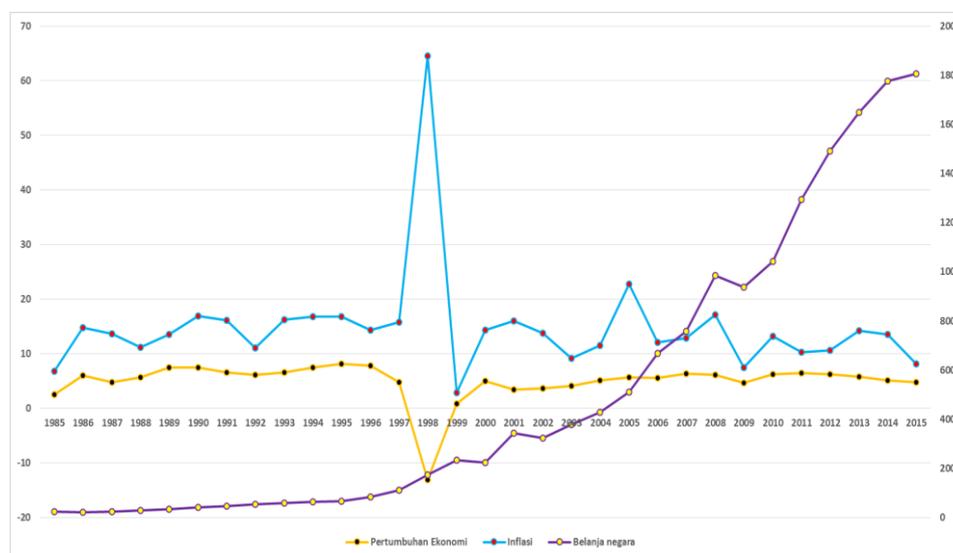
III. METODOLOGI ANALISIS

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *granger causality*. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kemudian untuk melihat arah hubungan belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi menggunakan regresi. Data yang digunakan adalah *time series* belanja negara, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dari tahun 1985-2015.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Belanja negara setiap tahun hampir mengalami kenaikan. Kenaikan besaran belanja negara diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga tingkat inflasi dalam batas-batas yang dapat ditolerir oleh perekonomian.

Gambar 1. Perkembangan belanja negara, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi



Sumber : Kemenkeu, data diolah

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa belanja negara cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang terjauh terjadi pada tahun 1998 saat kondisi perekonomian mengalami krisis moneter.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara belanja negara dan pertumbuhan ekonomi yaitu belanja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sebaliknya tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besaran belanja negara bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2. Uji Belanja negara dan pertumbuhan ekonomi

Pairwise Granger Causality Tests			
Date: 07/14/16 Time: 12:20			
Sample: 1985 2015			
Lags: 3			
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LNPE does not Granger Cause LNBLNJ	28	3.31933	0.0396
LNBLNJ does not Granger Cause LNPE		1.47623	0.2497

Arah hubungan belanja dan pertumbuhan ekonomi yaitu positif. Model regresi diperoleh yaitu: $\text{Pertumbuhan ekonomi} = 0,000407 \text{ belanja negara} + 4,798398$. Signifikansi dari variabel independent belanja 0,7387 dan variabel lain selain belanja 0,0000. R-squared dari model sebesar 0,004036 atau 0,0407 persen.

Kemudian hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara belanja negara dan inflasi yaitu belanja mempengaruhi inflasi. Sedangkan sebaliknya tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besaran belanja negara bisa mendorong inflasi.

Gambar 3. Uji Belanja negara dan inflasi

Pairwise Granger Causality Tests			
Date: 07/14/16 Time: 12:48			
Sample: 1985 2015			
Lags: 3			
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
INFLASI does not Granger Cause LNBLNJ	28	4.99918	0.0090
LNBLNJ does not Granger Cause INFLASI		2.16928	0.1218

Arah hubungan belanja dan inflasi yaitu positif. Model regresi diperoleh yaitu: $\text{Inflasi} = 0,524309 \text{ belanja negara}$. Signifikansi dari variabel independent belanja 0,0000. R-squared dari model sebesar 0,242550 atau 24,2550 persen.

Belanja negara pada dasarnya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa belanja bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Belanja negara tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan koefisien determinasinya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,0407 persen. Sedangkan belanja negara signifikan dalam mempengaruhi inflasi dan koefisien determinasinya cukup besar yaitu 24,2550 persen.

Faktor lain selain belanja negara, signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan postur belanja negara memiliki banyak komponen. Tidak semua komponen belanja negara berpengaruh langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh pada tahun anggaran. Misalnya proyek infrastruktur dampaknya setelah proyek selesai, proyek selesai juga belum bisa dipastikan pada tahun anggaran. Bahkan proyek infrastruktur berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Selain itu, dalam penelitian ini hanya terbatas melihat hubungan belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlunya analisis ini karena belanja negara hampir setiap tahun terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan belanja tersebut belum bisa dipastikan memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada inflasi hanya belanja negara yang signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar belanja negara bisa mendorong inflasi. Koefisien determinasi hanya sebesar 24,2550 persen. Dikarenakan belanja negara ada yang berhubungan langsung dengan inflasi dan ada yang tidak langsung.

Belanja negara tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun signifikan dalam mempengaruhi inflasi. Belanja negara dalam APBN terdiri dari belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang. Adapun belanja yang sifatnya tidak mengikat antara lain, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Dari seluruh komponen tersebut, kenaikan signifikan terjadi pada komponen belanja pegawai, yang dialokasikan untuk membayar gaji/honorarium PNS, tunjangan, kenaikan gaji berkala, dan pensiun. Meskipun belanja negara tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun kenaikannya dalam

tahun ke tahun dapat memicu terjadinya inflasi dalam bentuk kenaikan harga barang-barang. Komponen lain dalam belanja negara adalah besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang juga turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini sebagai *mandatory spending* yang harus dipenuhi pemerintah sesuai dengan mandat konstitusi.

Meskipun belanja negara tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bila merujuk pada teori pendapatan nasional berdasarkan pada pendekatan pengeluaran pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa kontribusi sektor-sektor di luar pemerintah seperti konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor dan impor secara akumulatif memberi sumbangan bagi peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Belanja negara signifikan dalam mempengaruhi inflasi. Kebijakan pemerintah dalam mengelola inflasi tercermin melalui besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah pada sektor-sektor yang menjadi penyumbang inflasi. Salah satu sektor yang menjadi komponen terbesar penyumbang inflasi adalah bahan makanan, dalam hal ini adalah beras. Besarnya alokasi anggaran untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan turut mempengaruhi seberapa besar inflasi yang dihasilkan. Kebijakan lainnya yang turut berpengaruh terhadap inflasi adalah kebijakan penetapan harga atas komoditas tertentu oleh pemerintah atau dikenal dengan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*). Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, diantaranya harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan tarif angkutan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Belanja negara merupakan upaya menggerakkan roda perekonomian nasional. Belanja negara setiap tahun hampir mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut belum bisa dipastikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dari hasil analisis data diperoleh hubungan yang signifikan antara belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Arah hubungan keduanya yaitu linier positif dan signifikan, kecuali belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat alokasi belanja pegawai dan belanja barang baik dalam komponen belanja pemerintah pusat maupun dalam komponen transfer ke daerah, terutama Dana Alokasi Khusus, proporsinya lebih besar

dibandingkan dengan alokasi belanja modal dalam komponen belanja pemerintah pusat dan dana alokasi khusus dalam komponen transfer ke daerah.

B. Rekomendasi

Pengaruh langsung belanja negara terhadap tingkat inflasi yang memiliki hubungan linier dan signifikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan prioritas belanja dalam penyusunan APBN. Alokasi belanja pegawai yang kian meningkat dari tahun ke tahun dapat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan pada tiga variabel yaitu belanja negara, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dan tidak memperhatikan variabel selain belanja, pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam beberapa tahun belakangan ini bisa jadi didukung oleh investasi sektor swasta.

Data statistik menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja pemerintah pusat ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik bruto. Pemerintah harus fokus untuk memperbesar alokasi belanja modal guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Postur Apbn Indonesia
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia, Edisi II
- Lestari, Sri Rahayu. 2011. *Outlook Penyerapan Belanja Kementrian/Lembaga*. Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2004. *Teori ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparmoko M.A. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Walpole, Ronal. 1993. Pengantar Statistika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama